



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 170 / 7 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2016
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 170/ TAHUN 2015
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2016

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2016

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ①	PERATURAN DAERAH	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	Perubahan Khusu Pada Aspek Persyaratan PPNS		✓	SATPOL PP	• BLH • DPU • DISHUBKOMIN- FO	Juni 2016	a. Direncanakan mencabut Perda lama Nomor 12 Tahun 2007 b. PP Nomor 43 Tahun 2012
2. ✓	PERATURAN DAERAH	STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH	a. Struktur Organisasi b. Tata Kerja *Bisa terdiri 1 Perda atau beberapa Perda tergantung pada hasil pembahasan		✓	BAGIAN ORPEG	SELURUH SKPD	Oktober 2016	Direncanakan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2009, 2 Tahun 2009, 3 Tahun 2009, 4 Tahun 2009, 5 Tahun 2009 dan 8 Tahun 2009 beserta perubahannya

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PERATURAN DAERAH	KEWENANG-AN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGA-NYAR	a. Maksud dan Tujuan b. Uraian Kewenangan		✓	BAPPEDA	a. INSPEKTORAT b. BAGIAN ORPEG	Juni 2016	Direncanakan mencabut Perda Nomor 7 Tahun 2008
4.	PERATURAN DAERAH	KEWENANG-AN PEMERINTAH DESA	a. Maksud dan Tujuan b. Uraian Kewenangan	✓		BAGIAN PEMDES-KEL	▪ BAPERMADES ▪ INSPEKTORAT	Juni 2016	Merupakan Tindak Lanjut dari UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP Nomor 47 Tahun 2015
5.	PERATURAN DAERAH	PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	a. Maksud dan Tujuan b. Pengendalian dan Penertiban c. Penetapan Zonasi PKL		✓	SATPOL PP	▪ DKP ▪ DISPERINDAG-KOP DAN UMKM	Juni 2016	Mencabut Perda Nomor 13 Tahun 2006
5.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENG-GARAAN PENDIDIKAN	a. Kewenangan Terkait Pendidikan Menengah b. Pendidikan Gratis		✓	DISDIKPO-RA	▪ BAPPEDA ▪ DPPKAD	Juni 2016	Perubahan terkait kewenangan Pemda sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Kebijakan Pemkab.

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Tentang Pendidikan Gratis
7.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL	a. Pengangkatan b. Pemindahan PNS dalam Jabatan Struktural c. Standar Kompetensi		✓	BKD	INSPEKTORAT	Juni 2016	Perubahan Perda terkait ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
8.	PERATURAN DAERAH	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA 2016-2032	a. Kedudukan, Ruang Lingkup dan Jangka Waktu b. Konsep dan Kebijakan	✓		DINAS PARIWISATA	BAPPEDA	Juni 2016	Merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 50 Tahun 2011
9.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	Penambahan Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada DPU dan Disperindagkop dan UMKM terkait PKL		✓	DPU	DPPKAD	Juni 2016	Merupakan Raperda Perubahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2012

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	PERATURAN DAERAH	UPAYA PENINGKAT- AN KUALITAS IBU DAN BAYI	a. Tujuan b. Kewajiban Pembab c. Upaya Pemda	✓		DKK	a. BP3AKB b. RSUD c. BAGIAN KESRA	Oktober 2016	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
11.	PERATURAN DAERAH	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Pengaturan tentang Layanan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Swasta	✓		DKK	a. RSUD b. BPMPTSP	Juni 2016	Merupakan Pedoman Perizinan Layanan Kesehatan
2.	PERATURAN DAERAH	PERLINDUNG- AN ANAK	Upaya Perlindungan Anak di Daerah	✓		BP3AKB	a. DINSOSNA- KERTRANS b. DKK c. DISDIKPORA	Oktober 2016	UU Nomor 23 Tahun 2002
3.	PERATURAN DAERAH	PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		✓	BAPPEDA	a. BAPERMADES b. DKK c. BAGIAN KESRA	Oktober 2016	Mencabut Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggara- an Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
	PERATURAN DAERAH	PENERANGAN JALAN UMUM	Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	✓		DKP	a. DPU b. DPPKAD	Oktober 2016	Guna Menata PJU Swadaya dan PJU Pemerintah

Rencana Pemeliharaan Desa Mengingat
- Konsentrasi Publikasi.

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN KARANGA- NYAR TAHUN 2013-2032	Perubahan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RTRW		✓	BAPPEDA	a. DISPERTAN- BUNHUT b. BPMPTSP c. DISPERINDAG- KOP dan UMKM	Oktober 2016	Perubahan Sebagai Akibat dari Evaluasi RTRW
6.	PERATURAN DAERAH	PERUBAHAN PERDA NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI	Perubahan Terkait Struktur dan Pengelolaanya		✓	BAGIAN PEREKO- NOMIAN	a. RSUD b. DPPKAD c. DKK	Juni 2016	Merupakan Tindak Lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7.	PERATURAN DAERAH	PENYELENG- GARAAN PARIWISATA	a. Kebijakan b. Usaha c. Peran Masyarakat	✓		DPRD	DINAS PARIWISATA	Oktober 2016	Merupakan Tindak Lanjut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
8.	PERATURAN DAERAH	NASIONALIS- ME SISWA	a. Tujuan b. Kewajiban Pemb c. Peran Serta	✓		DPRD	DISDIKPORA	Oktober 2016	Merupakan Tindak Lanjut UU Nomor 24 Tahun 2009

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Masyarakat						tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

DAFTAR RANCANGAN PERDA KUMULATIF TERBUKA

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
19.	PERATURAN DAERAH	AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG							
20.	PERATURAN DAERAH	APBD	a. APBD 2017 b. Pertanggung- jawaban APBD 2015 c. Perubahan APBD 2016						

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
21	PERATURAN DAERAH	AKIBAT PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH PROGRAM PEMBENTUK-AN PERDA DITETAPKAN							

KETUA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR,

